

JSW

JURNAL SOSIOLOGI WALISONGO

Kapasitas Refleksif Pemuda dalam Transisi Menuju Dunia Kerja

Okki Rahadianto Sutopo, Nanda Harda Pratama Meiji

Konstruksi Sosial Masyarakat terhadap Pemandu Karaoke:

Studi Kasus di Desa Botorejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak

Dewi Ratna Sari, Kuncoro Bayu Prasetyo

**Positivisme dan Strukturalisme: Sebuah Perbandingan Epistemologi
dalam Ilmu Sosial**

Galeh Prabowo

**Kajian Maskulinitas dan Masa Depan Kajian Gender dan Pembangunan
di Indonesia**

Nur Hasyim

**Gerakan Sosial Keagamaan pada Komunitas Urban: Studi Kasus Gerakan
Pengajian Ahad Pagi Bersama di Palebon, Pedurungan, Kota Semarang**

Thohir Yuli Kusmanto

**Harapan dan Kenyataan Penerapan “Kawasan Tanpa Rokok (KTR)”
di Lingkungan Kampus Universitas Udayana Denpasar**

Gede Kamajaya, Wahyu Budi Nugroho, Imron Hadi Tamim

Lahirnya Zaman Bahagia: Transformasi Teologi Pribumi di Tanah Papua

I Ngurah Suryawan

The logo for the journal, consisting of the letters 'JSW' in a bold, stylized, black font. The 'J' and 'S' are connected, and the 'W' is separate.

JURNAL SOSIOLOGI WALISONGO

JSW: Jurnal Sosiologi Walisongo - ISSN 2503-3166 (print) ISSN 2503-3182 (online) is a critical, reflective, and transformative academic media that is published by Laboratorium Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, in the effort for developing the discipline of Sociology having the perspective of unity of sciences. Article is based on research in all division of sociology like sociology of religion, sociology of politic, sociology of law, sociology of development, urban/rural sociology, democracy, social ethic, anthropology, community development, social philosophy, gender, and social welfare.

Editor in Chief

Misbah Zulfa Elizabeth, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang

Expert Editors

Abu Rokhmad, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang

Agus Nurhadi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang

Baidi Bukhori, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang

Irwan Abdullah, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Muhyar Fanani, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang

Najahan Musyafak, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang

Thohir Yuli Kusmanto, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang

Tri Marhaeni Pudji Astuti, Universitas Negeri Semarang

Editors

Kaisar Atmaja, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang

Akhriyadi Sofian, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang

Nur Hasyim, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang

Layout Editors

Helmi Suyanto, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang

Ulul Azmi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang

Publisher

LABORATORIUM SOSIOLOGI

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

Universitas Islam Negeri Walisongo

Semarang - Indonesia

Address

Gedung A - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang - Indonesia

Jl. Prof. Dr. HAMKA, Kampus III, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang 50185

Phone +62.24 - 7643 5986

e-mail:jurnal.sosiologi@walisongo.ac.id

Table of Contents

	page
Kapasitas Refleksif Pemuda dalam Transisi Menuju Dunia Kerja <i>Oki Rahadianto Sutopo, Nanda Harda Pratama Meiji</i> (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)	1 - 16
Konstruksi Sosial Masyarakat terhadap Pemandu Karaoke: Studi Kasus di Desa Botorejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak <i>Dewi Ratna Sari, Kuncoro Bayu Prasetyo</i> (Universitas Negeri Semarang)	17 - 32
Positivisme dan Strukturalisme: Sebuah Perbandingan Epistemologi dalam Ilmu Sosial <i>Galeh Prabowo</i> (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)	33 - 64
Kajian Maskulinitas dan Masa Depan Kajian Gender dan Pembangunan di Indonesia <i>Nur Hasyim</i> (Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang)	65 - 78
Gerakan Sosial Keagamaan pada Komunitas Urban: Studi Kasus Gerakan Pengajian Ahad Pagi Bersama di Palebon, Pedurungan, Kota Semarang <i>Thohir Yuli Kusmanto</i> (Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang)	79 - 98
Harapan dan Kenyataan Penerapan “Kawasan Tanpa Rokok (KTR)” di Lingkungan Kampus Universitas Udayana Denpasar <i>Gede Kamajaya, Wahyu Budi Nugroho, Imron Hadi Tamim</i> (Universitas Udayana, Denpasar)	99 - 120
Lahirnya Zaman Bahagia: Transformasi Teologi Pribumi di Tanah Papua <i>I Ngurah Suryawan</i> (Universitas Papua)	121 - 134

Author Guidelines

Acknowledgements

Positivisme dan Strukturalisme: Sebuah Perbandingan Epistemologi dalam Ilmu Sosial

Galeh Prabowo

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (e-mal: g.prabowo@mail.ugm.ac.id)

Abstract

The emergence of various types in epistemology shows that social sciences has grown dynamically. Several epistemologies which is usually applied by social scientist such as positivism, historicism, materialism, phenomenology, structuralism, and hermeneutics. Epistemology can be interpreted as a philosophical view that used in assessing social and cultural phenomena. As a social researcher, we have to be aware for using an epistemology in order to get results on the right path. In the other hand, most of the epistemologies have the advantages and weakness for understanding social and cultural phenomena. Therefore, this paper aim to explain the comparison between positivism and structuralism. It will be analyzed through some elements in epistemology for instance basic assumption, model and value.

Munculnya berbagai jenis epistemologi hingga saat ini menunjukkan bahwa ilmu sosial telah berkembang secara dinamis. Adapun beberapa epistemologi yang acapkali dipakai oleh para ilmuwan sosial budaya antara lain positivisme, historisme, materialisme, fenomenologi, strukturalisme, hermeunetik dan sebagainya. Epistemologi dalam hal ini secara sederhana merupakan pandangan filosofis yang digunakan dalam mengkaji peristiwa sosial budaya. Tentunya sebagai seorang peneliti kita harus sadar akan hal itu supaya kajian yang hendak dilakukan berjalan sesuai dengan koridornya. Disamping itu, suatu epsitemologi acapkali memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri di dalam memahami gejala sosial budaya. Maka dari itu, tulisan ini hendak memaparkan perbandingan diantara epistemologi positivisme dan strukturalisme. Hal ini dilakukan dengan melihat elemen dari masing-masing epistemologi seperti halnya asumsi dasar, model dan nilai.

Keywords: epistemology; positivism; structuralism; social sciences

Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan saat ini telah memunculkan berbagai macam epistemologi. Secara sederhana epistemologi dapat didefinisikan sebagai teori tentang pengetahuan (*theory of knowledge*) (Ahimsa-Putra, 2011: 19). Lebih lanjut lagi Ahimsa-Putra menegaskan bahwa epistemologi dapat diartikan juga sebagai ‘ilmu tentang pengetahuan’. Tujuannya yaitu dalam rangka mencari suatu kebenaran atas objek penelitian yang hendak dikaji. Adapun beberapa epistemologi yang telah tersebar di kalangan ilmuwan sosial, antara lain positivisme, historisisme, materialisme, fenomenologi, strukturalisme, hermeneutik, dan lain sebagainya.

Tulisan ini secara lebih fokus akan menyampaikan dua epistemologi dalam ilmu sosial. Kedua epistemologi yang dimaksud yakni positivisme dan strukturalisme. Tujuannya adalah membandingkan kedua epistemologi tersebut supaya mampu dipahami dan kedepannya pembaca sadar akan epistemologi yang digunakan dalam melakukan penelitian. Melalui pemahaman itu, seorang peneliti akan menyadari bahwa setiap epistemologi memiliki batas-batas yang menuntunnya dalam memahami gejala sosial-budaya secara optimal. Para peneliti nantinya dapat menentukan “alat” yang tepat dan sesuai ketika menyelami permasalahan fenomena sosial budaya.

Positivisme dalam Ilmu Sosial

Sejarah Kemunculan Positivisme

Hadirnya aliran positivisme dalam ranah ilmu pengetahuan sosial erat kaitannya dengan tokoh Auguste Comte, seorang filosof sekaligus sosiolog ternama. Aliran ini mulai dikembangkan oleh Comte sejak abad ke-19. Seiring dengan kemajuan jaman, positivisme juga dikembangkan oleh beberapa tokoh teoritis lainnya. Beberapa pemikir positivisme, selain Comte, yang cukup besar pengaruhnya dalam perkembangan positivisme adalah Saint-Simon, Emile Durkheim, Kolakowski dan Anthony Giddens.

Menurut Comte saat itu positivisme mengandung dua makna. Positivisme adalah suatu metode pengkajian ilmiah dan suatu tingkatan dalam perkembangan pikiran manusia (Saifuddin, 2005). Terkait dengan tahapan perkembangan manusia, Comte membaginya kedalam tiga tahapan. Pertama, tahapan teologis yakni pemikiran yang menganggap bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Pada tahapan ini, manusia acapkali mendapat pengaruh dogmatis dari agama yang cukup kuat. Kedua, tahapan metafisika yaitu pemikiran yang menganggap bahwa segala sesuatu berasal dari hal abstrak yang menyebabkan sesuatu. Tahapan terakhir adalah positivis, yakni pemikiran manusia yang mengacu berdasarkan sesuatu yang empiris.

Untuk memahami secara abstrak terlebih dahulu, sebaiknya perlu menengok pandangan filsafat positivisme yang pernah dikemukakan oleh Kolakowski dan beberapa penganut aliran positivisme lainnya. Kolakowski berpandangan bahwa positivisme merupakan sejumlah aturan dan kriteria penilaian terkait dengan pengetahuan manusia serta sebuah sikap normatif dalam rangka mengatur bagaimana menggunakan beberapa konsep seperti halnya “pengetahuan”, “ilmu pengetahuan”, “kognisi” dan “informasi” (Bryant, 1985: 2). Untuk memperjelas pandangan Kolakowski mengenai positivisme dalam ilmu sosial, terutama sosiologi, Anthony Giddens menyampaikan tiga pandangannya mengenai epistemologi ini. Ia mengatakan bahwa “*positivistic attitude*” dalam sosiologi mencakup paling tidak tiga pandangan yang saling berkaitan, yakni: pandangan bahwa (1) “*the procedure of natural science may be directly adapted to sociology*”; (2) “*the end results of sociological investigations can be formulated as “laws” or “law-like” generalizations of the same kind as those established by natural scientist, dan (3) “sociology has a technical character”*” (Ahimsa-Putra, 1997: 30-31).

Pandangan pertama positivisme menegaskan bahwa prosedur pengkajian atas fenomena yang diteliti oleh ilmu alam pada dasarnya bisa diterapkan kedalam ilmu sosial. Misalnya, ketika konteksnya dalam ilmu alam seorang peneliti mencari fungsi setiap bagian organisme, maka ilmu sosial pun juga dapat melakukannya.

Bedanya, ilmu sosial menerapkan analisis fungsi ke dalam objek penelitiannya yang berupa masyarakat. Sementara ilmuwan alam melakukan analisis fungsi ke dalam sebuah hewan, tumbuhan maupun manusia sebagai makhluk hidup. Pandangan ini bisa diaplikasikan karena masyarakat tersusun atas berbagai unsur dimana masing-masing elemen mempunyai fungsi tersendiri, sama seperti halnya fakta pada objek kajian ilmu alam.

Kedua, Giddens menyampaikan bahwa hasil akhir dari sebuah penelitian sosial mampu diformulasi ke dalam suatu hukum generalisasi. Hukum generalisasi bisa diperoleh melalui perbandingan di antara kebudayaan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Selanjutnya, ditemukanlah persamaan dan perbedaan diantara objek yang ditelitinya. Hal ini sekaligus mengantarkan peneliti ke dalam suatu hukum generalisasi atas kajian yang dilakukan.

Ketiga, sosiologi memiliki karakteristik berupa sifatnya yang aplikatif dan memberikan peranan penting bagi kajian pada masyarakat. Peranan penting dalam hal ini yaitu sosiologi mampu dipakai guna membentuk dan mengembangkan suatu masyarakat melalui berbagai teknik serta metode yang dimilikinya. Dengan kata lain, sosiologi memiliki kegunaan sebagai alat atau instrumen terkait dengan berbagai kebijakan pemerintah dalam upayanya menganalisis permasalahan dalam suatu masyarakat maupun dipakai untuk tujuan

memberdayakan masyarakatnya demi tercapainya segala hal yang berkaitan dengan proses pembangunan.

Asumsi Dasar Positivisme

Sebagai salah satu epistemologi ilmu pengetahuan sosial, positivisme memiliki asumsi dasar. Sebelum melangkah lebih jauh pada pemaparan asumsi dasar dari positivisme, alangkah baiknya jika dipahami terlebih dahulu konsep mengenai asumsi dasar. Istilah asumsi dasar dapat dikatakan sebagai pandangan-pandangan mengenai suatu hal yang telah diterima kebenarannya (Ahimsa-Putra, 2016). "Suatu hal" dalam konsep tersebut dapat dimaknai sebagai ilmu pengetahuan, tujuan sebuah disiplin maupun suatu benda. Sumber pandangan ini dapat diperoleh dari berbagai hal, antara lain dari perenungan-perenungan filosofis dan reflektif; penelitian-penelitian empiris yang canggung dan pengamatan yang seksama.

Apabila asumsi berasal dari pandangan filosofis dan reflektif si ilmuwan, maka pandangan ini mirip ideologinya. Konsekuensinya adalah segala bentuk asumsi dapat dikatakan bersifat subjektif. Hal ini karena asumsi-asumsi tersebut juga tergantung pada selera si ilmuwan. Asumsi dasar biasanya terdeteksi pada rumusan mengenai definisi sesuatu. Misalnya saja definisi evolusi, kebudayaan, maupun masyarakat. Pendefinisian mengenai sesuatu inilah yang merupakan langkah awal

suatu epistemologi. Dengan kata lain, asumsi dasar adalah fondasi dari sebuah disiplin keilmuan.

Penggunaan istilah "asumsi" rupanya memiliki alasan tertentu. Pemilihan kata itu dilandaskan pada kenyataan bahwa asumsi mengandung kebenaran yang bersifat relatif. Untuk itu, asumsi dasar sangat terbuka pada kritik dan saran. Hal ini sekaligus menjadi alasan mengapa Ahimsa-Putra lebih memilih istilah asumsi daripada dalil maupun hukum.

Dalam sebuah epistemologi tersimpan beberapa elemen asumsi dasar. Namun untuk mengetahui elemen asumsi dasar pada epistemologi, kita harus merujuk terlebih dahulu elemen asumsi dasar paradigmanya. Terdapat paling tidak enam butir elemen asumsi dasar yang menjadi landasan filosofis paradigma (Ahimsa-Putra, 2011: 19-20). Keenam elemen itu antara lain: (1) basis pengetahuan; (2) manusia; (3) gejala yang diteliti atau objek material; (4) ilmu pengetahuan; (5) ilmu sosial budaya dan (6) disiplin atau cabang ilmu yang dipelajari. Walaupun terdapat sejumlah elemen asumsi dasar dalam paradigma, namun belum tentu semuanya dapat dibandingkan diantara paradigma yang satu dengan lainnya.

Basis Pengetahuan dalam Positivisme

Positivisme memandang ilmu pengetahuan harus berdasarkan nalar (*reason*) dan pengamatan (*observation*) (Bryant, 1985). Nalar dan pengamatan pada positi-

visme berperan sangat penting ketika hendak mengkaji suatu fenomena. Asumsi ini sekaligus menggambarkan tentang positivisme yang selalu menjunjung tinggi fakta-fakta yang bersifat empiris. Hal ini kemudian berdampak pada gejala-gejala yang sifatnya tidak empiris (*ghaib*) cenderung diabaikan oleh positivisme. Alasannya adalah fenomena yang bersifat *ghoib* acapkali sulit dinalar dan dilakukan pengamatan.

Cara berpikir dengan memakai positivisme nampak tatkala seorang ahli kimia menguji sebuah zat di dalam makanan. Supaya mengetahui bahwa zat tersebut beracun, ia memberikannya ke seekor hewan. Ketika hewan itu memperlihatkan reaksi abnormal atau malah mati, maka secara empiris zat itu diduga mengandung racun. Pengamatan akan hal itu rupanya tidaklah cukup, si peneliti selanjutnya menguji kandungan zat di laboratorium. Tentunya demi mendapatkan alasan mengapa zat itu beracun. Disinilah nalar peneliti memiliki peranan yang sangat penting.

Fakta yang senada terjadi pula dalam kajian Clifford Geertz mengenai agama. Ia menggambarkan bahwa agama itu tidak hanya menciptakan keharmonisan semata. Akan tetapi agama mampu menciptakan perpecahan. Dengan kata lain, agama memiliki dua fungsi yakni sebagai penyatu maupun pemecah suatu kelompok masyarakat. Kondisi ini ditampilkannya ke dalam

hubungan diantara kaum abangan, santri dan priyayi yang notabene berada dalam satu agama yakni agama islam. Hal tersebut disampaikan pada salah satu bab di dalam bukunya.

“Antagonism among the several religious group is easily enough documented. The strain is clearly greatest between santris, and other two groups, but significant tension between prijaji and abangan also exist. This general antagonism has almost certainly increased markedly in this century, has sharply intensified since the Revolution, and is probably still increasing” (Geertz, 1960: 356).

Pelukisan Geertz mengenai agama di Jawa berdasarkan fenomena-fenomena sosial yang menggambarkan perpecahan akibat adanya agama. Pengamatan mengenai gejala perpecahan ini mengambil peranan yang sangat penting. Tujuannya adalah demi membuktikan dan mendukung argumen si peneliti. Alasan yang bisa dijangkau oleh nalar manusia harus ditampilkan. Oleh karena itu, Geertz mencari penyebab timbulnya perpecahan berdasarkan pengamatan dan nalar. Nalar inilah yang selanjutnya membimbing proses pengamatan.

Selain itu, positivisme sebagai sebuah epistemologi memiliki pandangan terhadap dunia beserta keobjektifannya. Bagi aliran positivisme, dunia ini hanya satu serta mempunyai eksistensi objektivitas (Bryant, 1985). Itu artinya, segala hal yang ada di dunia ini bisa dipelajari dan terlepas dari eksistensi subjektif. Kebudayaan se-

bagai produk manusia adalah bagian dari dunia karena hanya ada satu dunia. Di sinilah kebudayaan ditempatkan sebagai objek itu sendiri sehingga kebudayaan seperti halnya alam semesta yang memiliki keobjektifan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh kasus berikut ini. Seorang ahli biologi melakukan penelitian mengenai kandungan darah yang ada pada seekor sapi. Ia kemudian mengambil sampel darah objek penelitiannya untuk diamati di laboratorium. Tindakan ahli biologi dalam mengambil sampel darah serta meneliti-nya pada sebuah laboratorium tidak akan berpengaruh terhadap metabolisme tubuh objek penelitiannya. Inilah yang dinamakan sebagai eksistensi objektif.

Lantas bagaimana objektivitas kebudayaan dalam ilmu sosial menurut aliran positivisme? Kita akan melihatnya pada fenomena sosial berupa inisiasi. Jika kita pahami lebih lanjut, ritual inisiasi mempunyai fungsi sebagai penanda seorang anak telah beranjak dewasa. Pada masyarakat Muslim di Jawa fakta sosial inisiasi adalah khitanan. Sementara masyarakat Hindu di Bali memiliki ritual inisiasi berupa potong gigi. Objektivitas ini nyata keberadaannya karena ketika seorang ilmuwan sosial melakukan penelitian pada masyarakat itu, tindakannya dalam meneliti proses ritual inisiasi tidak berpengaruh pada perubahan proses dan bentuk dari inisiasi itu sendiri. Artinya, subjektivitas dapat

terlepas dari objek penelitiannya. Dengan demikian, eksistensi objektivitas dalam ilmu sosial bisa diterapkan seperti halnya ilmu alam.

Manusia dalam Positivisme

Dalam pandangan positivisme, masyarakat adalah realitas tersendiri, maka dari itu mereka bisa dipelajari secara ilmiah (Bryant, 1985). Asumsi ini erat kaitannya dengan pemikiran Durkheim yang menyarankan untuk melihat masyarakat tidak hanya sebatas sekumpulan individu semata, tetapi sebagai sebuah masyarakat yang di dalamnya memiliki suatu sistem. Sistem itulah yang merepresentasikan realitas dan mempunyai karakteristik tersendiri. Alhasil, masyarakat dapat dipelajari sebagai sebuah benda atau gejala alam yang mempunyai karakteristik dan sistem tertentu. Implikasinya yaitu studi tentang masyarakat dilakukan menggunakan metode penelitian seperti halnya yang dipraktekkan dalam mempelajari objek alam.

Bukti bahwa masyarakat memiliki sistem dan karakteristik masing-masing terlihat pada organisasi sosialnya. Bentuk dan pembagian kerja pada masyarakat yang masih berada di fase berburu dan meramu tentu berbeda dengan masyarakat yang mata pencahariannya bercocok tanam. Pada kasus itulah organisasi sosial yang merupakan produk dari manusia dapat dipelajari melalui penelitian dengan

memperhatikan sistem serta karakteristik seperti halnya melakukan kajian pada objek alam.

Selain itu, positivisme memandang manusia memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini terlihat ketika manusia diletakkan pada suatu komunitas atau masyarakat. Hal ini kemudian memperlihatkan bahwa manusia selalu memiliki fungsi ketika dikaitkan dengan relasi-relasi sosial antar individu lainnya. Misalnya saja, terdapat hubungan patron-klien dalam suatu masyarakat. Setiap individu ada yang berperan sebagai patron, sementara individu lainnya berperan sebagai klien.

Positivisme memandang manusia maupun masyarakat acapkali mempunyai ketentraman atau tata tertib sosial (*social order*). Bagi positivisme, tata tertib sosial merupakan hal yang bersifat alami dalam suatu masyarakat (Bryant, 1985). Atas asumsi itu, maka segala tindakan manusia memiliki sisi yang natural. Dengan demikian, ilmuwan sosial mampu melakukan penelitian terhadap manusia seperti halnya ilmuwan alam ketika meneliti objek penelitiannya.

Kebudayaan dalam Positivisme

Bagi positivisme, dunia ini memiliki unsur-unsur dan unsur tersebut bergerak dinamis mengikuti hukum-hukum tertentu (Bryant, 1985). Asumsi ini berangkat dari fakta alam bahwa segala sesuatu yang

ada di dunia ini mempunyai unsur-unsur di dalamnya. Unsur inilah yang terkandung dalam setiap objek material maupun non material di alam semesta. Bagi kaum positivis, unsur ini ada yang bersifat statis dan adapula yang bergerak secara dinamis. Unsur yang bergerak secara dinamis selalu mengikuti hukum-hukum tertentu. Itu artinya, pergerakan dari unsur tersebut berjalan menurut pola-pola yang tetap sehingga menghasilkan suatu hukum untuk bisa dipelajari. Pergerakan dari unsur yang menggambarkan suatu hukum acapkali berlangsung secara berulang. Untuk itu, positivisme tidak menafikkan apabila hukum-hukum tersebut menyimpan pergerakan yang teratur (*regularity*).

Fakta mengenai asumsi ini dapat dibuktikan pada gejala gerhana matahari dan bulan. Fenomena berlangsungnya kedua gerhana itu mempunyai hukum keteraturan. Kondisi demikian dapat terjadi karena terdapat berbagai unsur yang menyusunnya. Beberapa unsur yang membentuk gejala alam itu antara lain bumi, bulan dan matahari. Ketiganya melintas dalam jalurnya masing-masing. Perhitungan dapat dilakukan terhadap fenomena gerhana matahari dan bulan sehingga terciptalah suatu hukum yang mampu dipakai guna memprediksi kejadiannya. Di samping itu, pergerakan dari setiap unsur di dalamnya saling berkaitan. Untuk itu, apabila terjadi perubahan gerak pada

salah satu unsur yang menciptakan gerhana, maka prediksi mengenai kejadian gerhana turut serta mengalami perubahan.

Senada dengan kasus di atas, suatu kebudayaan mengandung berbagai unsur yang menyusunnya. Hal ini dipertegas oleh Koentjaraningrat (2013) yang menyatakan suatu masyarakat mempunyai berbagai unsur kebudayaan antara lain bahasa, kesenian, organisasi sosial, sistem pengetahuan, sistem kepercayaan, sistem mata pencaharian, serta sistem peralatan hidup dan teknologi. Pergerakan dari setiap unsur tentunya berdasarkan hukum-hukum yang dapat dipelajari. Misalnya saja, kosa-kata dalam bahasa Indonesia akan semakin bertambah seiring dengan kemajuan teknologi. Kosa kata “surat elektronik” tidak akan muncul dalam bahasa Indonesia apabila teknologi dalam peradaban manusia tidak menciptakan jaringan internet.

Di sisi lain, positivisme memandang bahwa dalam kebudayaan terdapat hukum-hukum perkembangan sejarah yang memungkinkan untuk menjelaskan masa lampau, memahami masa kini dan memprediksi masa depan (Bryant, 1985). Gejala sosial maupun gejala alam di dunia ini memiliki hukum tertentu di dalam pergerakan serta perubahannya. Secara lebih spesifik asumsi ini meyakini bahwa hukum atas fakta yang berlangsung di dunia ini bersifat diakronis. Dengan kata

lain, terdapat hukum-hukum perkembangan sejarah yang tergambar secara horizontal.

Asumsi ini senada dengan argumennya Saint-Simon. Dunia ini mengandung serangkaian peristiwa alam dan sosial. Ketika salah satu bagian dari peristiwa itu berhasil dikaji secara benar, maka tindakan merumuskan peristiwa selanjutnya dapat dilakukan dengan mudah (Bryant, 1985: 17). Hal inilah yang selanjutnya membuat hukum-hukum perkembangan sejarah mampu dipakai untuk memahami masa kini dan memprediksi masa depan.

Penerapan asumsi ini tergambar dalam kajiannya Leslie White mengenai evolusi kebudayaan manusia. Penelitiannya itu menyimpulkan bahwa perkembangan kebudayaan manusia yang pada awalnya berlangsung lambat, tetapi kemudian maju dengan pesat disebabkan karena manusia selalu dapat menguasai berbagai macam sumber energi yang makin lama makin banyak dan intensif (Koentjaraningrat, 2015: 120-121). Tahapan perkembangan kebudayaan manusia digambarkannya melalui beberapa fase. Awalnya manusia hidup dalam kondisi masyarakat yang sangat sederhana. Mereka hanya menggunakan tenaga yang dimiliki oleh tubuhnya untuk bertahan hidup. Fase inilah yang kemudian dikenal sebagai “berburu dan meramu”. Lambat laun manusia mampu menggunakan tenaga hewan guna memenuhi kebutuhan

hidupnya. Hingga pada akhirnya manusia mengenal cara bercocok tanam yang sekaligus memanfaatkan energi matahari untuk memproduksi makanannya. Dalam hal ini perkembangan kebudayaan dimotori oleh tingkat penguasaan teknologi untuk mengolah segala sumberdaya di sekitarnya.

Kajian mengenai perkembangan sejarah masyarakat pernah dikaji pula oleh Emile Durkheim. Pemikiran Durkheim ini acapkali terkenal sebagai "*The Division of Labour*". Menurut pemikirannya, dalam suatu masyarakat terdapat perkembangan sejarah atau evolusi dari tingkatan spesialisasi terendah hingga tertinggi (Inkeles, 1965: 31). Durkheim membagi masyarakat kedalam dua tahapan. Tahapan pertama disebut sebagai "*mechanical solidarity*". Masyarakat pada tahapan tersebut bercirikan komunitasnya kecil dimana tingkat spesialisasinya sangat terbatas. Mereka bekerja bersama dalam satu ikatan sebuah institusi kekerabatan maupun agama. Tahapan kedua disebut sebagai "*organical solidarity*". Dalam tahapan ini, hubungan yang terjalin antar individu kurang akrab. Hal ini dikarenakan individu terikat dengan individu lainnya berdasarkan kepentingan bersama, kontrak atau hal lainnya. Pada tahapan ini keterikatan antar individu bukan lagi berdasarkan kekerabatan. Tingkat spesialisasinya cenderung lebih tinggi daripada tipe masyarakat yang pertama. Durkheim juga

meyakini bahwa masyarakat pada tipe kedua merupakan bentuk evolusi dari masyarakat tipe pertama. Berdasarkan kajian Leslie White dan Emile Durkheim, maka asumsi mengenai hukum-hukum perkembangan sejarah terlihat jelas pada proses evolusi kebudayaan dan evolusi pembagian kerja.

Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Positivisme

Sejarah perkembangan ilmu alam dan ilmu sosial di dunia ini hadir secara berurutan. Ilmu pengetahuan alam terlebih dahulu berkembang daripada ilmu pengetahuan sosial. Awal mulanya ilmu sosial masih diragukan sifat keilmiahannya di mata para ahli ilmuwan alam. Atas keraguan mengenai sifatnya yang ilmiah, para ilmuwan sosial selanjutnya mengarahkan pandangan filosofisnya ke arah pandangan para ilmuwan alam ketika mencari kebenaran. Upaya ini bertujuan supaya ilmu sosial mampu dipandang setara dengan ilmu alam dalam bingkai suatu ilmu pengetahuan. Segala cara yang dipakai oleh ilmu alam saat melakukan kajian pada objek penelitiannya diadopsi oleh para ilmuwan sosial. Maka timbulah positivisme dalam tubuh ilmu sosial dan budaya.

Positivisme pada ilmu sosial budaya terlihat jelas lewat tujuan dan metode yang dilakukan para ilmuwan sosial dalam memahami gejala sosial. Dalam konteks ini, positivisme memandang bahwa tujuan

dari ilmu sosial adalah mencari perbandingan antara fenomena sosial yang satu dengan lainnya. Hal tersebut kemudian berujung pada perolehan generalisasi atas fenomena tertentu. Oleh karena itu, penekanan untuk melakukan perbandingan sangatlah penting bagi positivisme guna mendapatkan generalisasi yang mengarahkan terciptanya perumusan hukum-hukum atas berlangsungnya suatu fenomena sosial budaya.

Seperti halnya ilmu alam, positivisme dalam ilmu sosial mempertimbangkan pula eksistensi relativitas ilmu pengetahuan (Bryant, 1985). Ilmu pengetahuan sebagai produk dari manusia sulit dilepaskan dari kenyataan tentang eksistensi relativitas di dalamnya. Artinya, kebenaran yang diketahui oleh manusia tidak pernah absolut. Hal ini didasarkan fakta bahwa setiap orang memiliki keterbatasan nalar dan pengamatannya masing-masing. Bukanlah hal yang mengherankan apabila terjadi perbedaan hasil penelitian antara ilmuwan yang satu dengan ilmuwan yang lainnya. Untuk mengatasi adanya keterbatasan nalar dan pengamatan, para ilmuwan senantiasa mengembangkan berbagai metode dan teknologi. Misalnya saja, teknologi mikroskop diciptakan guna mendukung pengamatan manusia terhadap objek penelitian yang sangat kecil. Hal ini dikarenakan daya penglihatan manusia terbatas sehingga membutuhkan bantuan teknologi dalam melihat objek yang sangat kecil. Tujuannya

adalah, yaitu demi menghasilkan pengetahuan baru mengenai objek penelitiannya.

Asumsi ini terlihat semakin nyata ketika dunia kesehatan belum menemukan jenis virus flu burung. Sekitar tahun 1990-an, kemungkinan besar gejala-gejala yang dihasilkan oleh virus flu burung sudah muncul di Indonesia. Namun, para ahli kesehatan di negeri ini belum mampu mengidentifikasi jenis virus tersebut sekitar tahun 2000-an. Hal ini dikarenakan teknologi yang dipakai untuk mengidentifikasi virus belum mampu untuk mengkaji karakteristik virus flu burung. Dengan demikian, keterbatasan nalar dan pengamatan menjadikannya ilmu pengetahuan bersifat relatif.

Contoh lainnya dalam ilmu sosial nampak pada kasus pemilihan umum tiga tahun yang lalu. Tepatnya ketika pemilihan umum presiden ketujuh Indonesia diselenggarakan. Saat itu, berbagai lembaga survei berlomba melakukan prediksi mengenai hasil akhir pemilihan umum. Mereka mengambil sampel dari seluruh wilayah provinsi yang ada di Indonesia. Namun apa yang terjadi? Berbagai lembaga survei menampilkan hasil yang berbeda dan bahkan cenderung bertolak belakang. Alasannya adalah terdapat perbedaan lokasi pengambilan sampel di antara lembaga survei yang satu dengan lembaga survei yang lainnya. Kemungkinan juga sampel yang diambil porsinya

berbeda. Selain itu bisa jadi terdapat perbedaan alat serta metode yang digunakan. Kondisi itulah yang disebut sebagai relativitas ilmu pengetahuan.

Selain itu, positivisme meyakini bahwa pengetahuan positivis melampaui pengetahuan yang negatif (kritis) (Bryant, 1985). Asumsi ini menegaskan bahwa pengetahuan positivisme lebih baik daripada pengetahuan yang sifatnya kritis. Bagi kalangan pemikir positivis, pengetahuan yang mereka miliki cenderung bersifat konstruktif. Artinya, pengetahuan mereka bertujuan untuk membangun, bukannya mengkritisi seperti halnya aliran materialisme. Akibatnya, karya para pemikir positivisme seringkali bersifat kurang kritis apabila dibandingkan dengan kajian-kajian kaum kritis. Walaupun demikian, pemikiran kritis memang bukanlah tujuan awal dari para kaum positivisme. Hal ini dikarenakan pemikiran positivisme lebih kepada upaya menjelaskan sebab akibat terjadinya suatu fenomena sosial.

Penerapan asumsi itu nampak pada tulisannya Selo Soemardjan yang berjudul *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Baginya, suatu perubahan ideologi dasar suatu masyarakat (misalnya, dalam agama atau konsep tentang negara) atau perubahan orientasi dari masa lampau ke masa depan mudah menimbulkan kekuatan-kekuatan yang menyebabkan timbulnya perubahan sosial (Soemardjan, 1991: 303). Lebih lanjut lagi, ia memaparkan perubahan-

perubahan politik dan pemerintahan Yogyakarta yang diprakarsai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX melalui perubahan bentuk pemerintahan feodal ke pemerintahan demokrasi. Pemaparan Soemardjan tersebut nampak jelas bahwa kajiannya bersifat konstruktif (membangun) dengan cara memaparkan proses maupun elemen-elemen yang mendorong berlangsungnya perubahan sosial. Kajian itu berhasil menampilkan faktor-faktor apa sajakah yang menimbulkan perubahan di Yogyakarta. Maka dari itu, kajian Soemardjan ini sangat cocok sebagai bahan pertimbangan para pengambil kebijakan karena hasilnya bersifat konstruktif.

Model Positivisme

Komponen lain yang amat penting bagi sebuah epistemologi adalah model. Model menurut Ahimsa-Putra (2016: 28) merupakan perumpamaan, analogi, atau kiasan tentang gejala yang dipelajari. Sebuah model juga dapat dimaknai sebagai gambaran umum dari suatu gejala yang mengandung gagasan mengenai fenomena tersebut (Inkeles, 1965: 28). Secara sederhana, model adalah bentuk penyederhanaan atas suatu realitas. Disamping itu, model acapkali bertujuan mengarahkan seorang peneliti ketika hendak mempelajari suatu fenomena sosial budaya. Alhasil, secara implisit model selalu berkaitan erat dengan asumsi dasar yang dipegang oleh seorang peneliti.

Mengacu pada asumsi dasar yang dianut oleh para kaum positivis, maka kita akan menemukan sebuah model yang mencerminkan pemikiran mereka di dalam ilmu sosial. Salah satu model yang dapat digunakan untuk menggambarkan pemikiran kaum positivis yakni kebudayaan seperti halnya organisme yang memiliki fungsi pada setiap unsur-unsurnya. Model ini mengacu pada asumsi dasar yang mengungkapkan bahwa dunia ini memiliki unsur-unsur yang bergerak dinamis mengikuti hukum-hukum tertentu. Seperti halnya organisme, unsur-unsur yang terdapat dalam suatu kebudayaan memiliki fungsinya masing-masing. Misalnya saja, unsur bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi diantara individu yang satu dengan lainnya.

Model lain yang dapat dirumuskan melalui asumsi dasar ini adalah kebudayaan itu seperti halnya alam semesta. Artinya ia mengandung hukum-hukum umum (*general law*) dalam setiap dinamika suatu kebudayaan. Dengan adanya hukum-hukum tersebut, maka perkembangan kebudayaan dapat dipelajari. Model inilah yang digunakan sebagai pembimbing supaya para ilmuwan sosial mampu memprediksi masa depan serta memahami masa lalu. Hal ini berkaitan pula dengan semboyan positivisme "*savoir pour prévoir*" (mengetahui untuk meramalkan) yang terkandung intensi untuk menciptakan rekayasa masyarakat (*social-engineering*) dalam sosiologi (Hardiman, 2003: 56).

Nilai dalam Positivisme

Epistemologi positivisme sebagai alat pencari suatu kebenaran rupanya memiliki serangkaian nilai yang dianutnya. Beberapa nilai dalam positivisme sebenarnya telah tercantum secara implisit di dalam asumsi dasarnya. Konsep nilai dalam konteks epistemologi dimaksudkan sebagai sejumlah kriteria atau patokan yang digunakan untuk menentukan apakah sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah, bermanfaat atau tidak (Ahimsa-putra, 2016). Jika kita pahami secara seksama berdasarkan konsep itu, maka akan ditemukan sejumlah nilai yang dianut oleh para kaum positivis.

Terkandung dua nilai dalam positivisme yang menjadi pedoman dalam mengkaji suatu fenomena. Pertama, objektivitas demi memperoleh ilmu pengetahuan diperoleh melalui sesuatu yang empiris. Secara sederhana dapat dipahami bahwa segala fenomena yang mampu dipelajari oleh seluruh panca indera manusia maka kebenarannya tidak diragukan lagi. Maka dari itu, salah satu asumsi dasar pada positivisme mengedepankan pengamatan dan nalar yang membimbing seorang peneliti demi mencapai suatu kebenaran.

Nilai kedua yang tertanam pada asumsi dasar positivisme yaitu ilmu pengetahuan yang baik mampu menemukan hukum-hukum umum (*general law*). Nilai tersebut terkait dengan upaya positivisme dalam melakukan perbandingan demi mencari

hukum-hukum umum sehingga generalisasi pun dapat dilakukan. Selain itu, perumusan hukum pada sebuah fenomena bertujuan pula supaya ilmuwan positivis mampu menjelaskan masa lampau, memahami masa kini, dan memprediksi masa depan.

Keunggulan dan Kelemahan

Sebagai sebuah “alat” yang bertujuan memahami berbagai fenomena sosial, sebuah epistemologi sulit dilepaskan dari fakta adanya keunggulan serta kelemahan. Adapun beberapa keunggulan dalam epistemologi positivisme. Pertama, keobjektifan dalam positivisme dapat terukur dan teruji secara empirik. Kedua, positivisme mengakui adanya relativisme ilmu pengetahuan. Implikasinya adalah ia lebih toleran dengan adanya perbedaan hasil suatu penelitian. Ketiga, penelitian dengan memakai positivisme mampu diterapkan untuk memahami masa lalu, masa kini dan memprediksi masa depan. Keunggulan tersebut berkaitan dengan asumsi dasar positivisme yang bertujuan mencari hukum-hukum umum. Untuk selanjutnya, hukum-hukum itu mampu menggambarkan perkembangan sejarah kebudayaan suatu masyarakat.

Positivisme selain memiliki keunggulan rupanya menyimpan kelemahan di dalam memahami gejala sosial-budaya. Dengan menggunakan positivisme, seorang peneliti hanya terbatas pada kajian fenomena

sosial budaya yang bersifat empiris. Itu artinya, mereka hanya terpaku pada realitas empiris dan menafikkan realitas imajiner (wacana) ketika melakukan penelitian. Padahal, suatu masyarakat memiliki kedua realitas tersebut dalam kesehariannya. Kelemahan ini juga turut serta diamini oleh Jonathan Turner yang berargumen bahwa dunia sosial kondisinya berbeda dengan dunia alam. Maka dari itu, bagi Turner, dunia sosial (*social world*) atau fenomena sosial tidak bisa dipelajari dengan metode yang sama ketika mempelajari dunia alam (*natural world*) (Heidtmann, Wysienska, & Szmata, 2000: 3). Implikasinya adalah positivisme sulit dipakai untuk menangkap dan memahami gejala sosial yang sifatnya non-empiris serta hal-hal yang terkandung di alam bawah sadar manusia. Artinya, pemaknaan terhadap pengetahuan suatu masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sulit dipahami dengan memakai epistemologi positivisme. Perihal yang sifatnya non-empiris itu misalnya saja pengetahuan sekelompok masyarakat mengenai klasifikasi tanaman obat yang tersebar di hutan. Contoh kasus lainnya yaitu positivisme tidak mampu menggali secara mendalam mengenai makna dibalik fenomena ritual pada suatu masyarakat. Disamping itu, kelemahan lain terletak pada upaya positivisme guna mencapai generalisasi justru berimplikasi mereduksi keanekaragaman serta keunikan yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Hal ini merupakan

dampak dari usaha untuk membandingkan supaya memperoleh generalisasi.

Strukturalisme dalam Ilmu Sosial

Sejarah Kemunculan Strukturalisme

Seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, ilmu pengetahuan turut serta mengalami kemajuan. Kemajuan dalam hal ini diartikan sebagai kondisi dimana terdapat inovasi untuk memahami objek ilmu pengetahuan secara lebih baik. Faktanya terlihat ketika epistemologi yang merupakan bagian dari ilmu pengetahuan telah berkembang dan semakin beraneka ragam jenisnya, terutama di dalam ilmu pengetahuan sosial. Bertambahnya ragam epistemologi tersebut sulit dipisahkan dari keberadaan epistemologi sebelumnya. Maka dari itu, epistemologi baru acapkali merupakan wujud kritik ataupun pengembangan dari epistemologi pendahulunya.

Keadaan ini berlaku bagi strukturalisme sebagai salah satu epistemologi dalam ilmu pengetahuan sosial. Berdasarkan sejarahnya, strukturalisme adalah epistemologi yang mengkritisi positivisme. Kemunculan strukturalisme dipopulerkan oleh Claude Levis-Strauss, seorang ahli antropologi perancis. Selain itu, terdapat pula strukturalisme yang dikembangkan oleh Werner, antropolog amerika serikat. Meskipun demikian, bagian ini hanya fokus mengkaji strukturalisme yang dikembangkan oleh Levi-Strauss.

Berkembangnya salah satu aliran struktural yang dipelopori oleh Levi-Strauss mulai nampak sekitar tahun 1950-an hingga 1960-an. Strukturalisme yang dibawakan oleh Levi-Strauss erat kaitannya dengan struktural-fungsionalisme yang dipopulerkan oleh Radcliffe-Brown. Adanya kaitan diantara keduanya dikarenakan terdapat pengaruh dari teori-teorinya Durkheim. Meskipun demikian, aliran struktural yang dipahami keduanya tidaklah sama. Radcliffe-Brown mempelajari keteraturan dalam tindakan sosial yang ia lihat sebagai ekspresi struktur sosial yang dibentuk oleh jaringan-jaringan dan kelompok-kelompok. Sementara Levi-Straus berpendapat bahwa struktur itu berada dalam alam pikir manusia dan memandang interaksi sosial sebagai manifestasi keluar dari struktur kognitif tersebut (Saifuddin, 2005: 192).

Seperti yang dipaparkan sebelumnya, strukturalisme hadir karena ketidakpuasan atas hasil kajian antropologi dengan menggunakan positivisme. Levi-Strauss kemudian menyangkal argumen Wiener yang meragukan keobjektifan dalam ilmu pengetahuan sosial. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa di dalam ilmu sosial terkandung objektivitas tanpa harus mengikuti aliran positivisme. Adapun dasar maupun alasan yang digunakan oleh Wiener untuk mempertanyakan keobjektifan tersebut.

Pertama, Wiener (Levi-Strauss, 2005: 75-76) beranggapan sifat ilmu sosial

sendiri berimplikasi bahwa perkembangannya berkumandang pada objek investigasinya. Artinya, termuat hubungan saling mempengaruhi antara peneliti sosial dengan objek penelitiannya yang acapkali berupa fenomena sosial di masyarakat tertentu. Argumen Wiener itu atas dasar bahwa ilmuwan sosial dan objek yang ditelitinya berada pada kesamaan satu tatanan (orde). Salah satu contohnya adalah ketika seorang pengamat melakukan penelitian di suatu komunitas yang mempunyai tata aturan serta adat tersendiri. Otomatis si pengamat kemungkinan besar terhanyut ke dalam tata aturan milik masyarakat yang dipelajarinya. Terlebih lagi, si pengamat biasanya berasal dari luar kebudayaan objek penelitiannya. Kemungkinan si pengamat mempengaruhi tingkah laku serta kebudayaan pada masyarakat yang ditelitinya dapat terjadi. Hal ini berbeda dengan ilmu alam yang secara jelas keobjektifannya dapat dipertanggungjawabkan. Objektivitas dalam ilmu alam nampak pada keterpisahan hubungan antara sang pengamat dengan objek yang ditelitinya. Kita dapat mengambil contoh seorang geolog dalam meneliti gunung berapi. Walaupun jarak diantara keduanya saling berdekatan, namun sang peneliti sulit mempengaruhi aktivitas objek penelitiannya. Aktivitas gunung berapi akan berjalan seperti biasa berdasarkan hukum-hukum alam tanpa pengaruh atas kehadiran peneliti di sekitarnya.

Kedua, fenomena-fenomena yang ditempatkan sebagaimana adanya dalam riset-riset sosiologi dan antropologi didefinisikan menjadi fungsi kepentingan kita sendiri, yang berkaitan dengan kehidupan, pendidikan, karier dan kematian individu seperti kita. Dengan kata lain, keobjektifan mustahil diperoleh ilmuwan sosial karena objek penelitiannya adalah seorang individu seperti halnya peneliti itu sendiri. Singkatnya, peneliti ilmu sosial melakukan penelitiannya terhadap dirinya sendiri sebagai seorang individu. Inilah yang menjadi alasan Wiener terkait ketiadaan objektivitas di dalam ilmu sosial.

Pandangan Wiener mengenai kemustahilan objektivitas ilmu sosial akhirnya ditolak oleh Levi-Strauss. Ia meyakini adanya keobjektifan yang terkandung dalam ilmu sosial. Gagasan Wiener dibantahnya dengan alasan bahwa keobjektifan ilmu sosial mampu dicapai karena terkandung suatu elemen dalam kebudayaan yang tidak bisa dipengaruhi oleh si peneliti. Elemen kebudayaan yang dimaksud adalah bahasa. Realitasnya tergambar pada fenomena seorang individu ketika berbicara. Tatkala individu berkomunikasi melalui bahasa, ia sebenarnya tidak menyadari aturan-aturan yang berlaku dalam pembentukan kalimat yang disampaikan. Aturan-aturan itu acapkali disebut sebagai tata bahasa yang dimiliki oleh segala jenis bahasa di muka bumi ini. Hal ini dikarenakan aturan-aturan tata bahasa

bersifat *unconsciousness*. Berdasarkan kenyataan itu maka sulit rasanya jika seorang peneliti mampu mempengaruhi *grammar* yang notabene berada dalam alam bawah sadar. Seperti halnya bahasa, kebudayaan yang menjadi objek penelitian ilmu sosial sebenarnya berasal dari alam bawah sadar manusia sehingga sulit dipengaruhi oleh pihak peneliti.

Atas dasar itulah selanjutnya Levi-Straus mencari jalan memahami kebudayaan tanpa memakai positivisme dan lebih memilih mendekati linguistik. Menurut para antropolog semestinya mengadopsi analisis linguistik, terutama analisis struktural bahasa dengan alasan ilmu linguistik mengkaji bahasa, notabene sebuah fenomena sosial yang mempunyai dua karakteristik mendasar dan akan membuatnya semakin relevan untuk analisis ilmiah (Ahimsa-Putra, 2003: 247). Sejumlah karakteristik mendasar yang dimaksud oleh Levi-Strauss antara lain, *pertama*, bahwa sebagian perilaku bahasa adalah produk dari alam bawah sadar pikiran manusia. Kenyataan ini nampak ketika seseorang berbicara, ia tidak sadar akan sintaksis dan hukum morfologi dalam bahasa yang digunakan. Maka dari itu, dalam melakukan kajian terhadap bahasa, seorang peneliti tidak perlu khawatir apabila kehadirannya mempengaruhi objek yang ditelitinya. Hal ini dikarenakan si peneliti tidak dapat mempengaruhi maupun mengubah fenomena

bahasa tersebut. *Kedua*, dalam sejarah kehidupan manusia, bahasa merupakan elemen yang muncul lebih awal. Karakteristik inilah yang semakin memantapkan posisi kajian bahasa sebagai objek penelitian yang sah.

Selain kedua hal itu, Levi-Strauss menyadari bahwa terdapat persamaan di antara bahasa dan kebudayaan. Ia berpandangan kita juga bisa memperlakukan bahasa sebagai kondisi kebudayaan, melalui dua cara (Levi-Strauss, 2005: 93). Pertama, hubungan diakronis, dengan cara berbahasalah individu mampu memperoleh kebudayaan dari individu lain maupun kelompoknya. Kenyataan ini nampak ketika seorang anak dalam masyarakat Jawa mengambil ataupun menerima sesuatu dengan tangan kiri justru dimarahi oleh orang tuanya. Hal ini dikarenakan perilaku mengambil dan menerima dengan tangan kiri dianggap tidak sopan dan tidak baik bagi masyarakat Jawa. Tangan kananlah yang seharusnya digunakan untuk melakukan hal itu. Melalui bahasa yang diucapkan oleh orang tuanya, seorang anak mulai membiasakan diri bertingkah laku sesuai nilai yang dianggap benar oleh orang tuanya.

Kedua, dengan cara menempatkan diri pada sudut pandang yang lebih teoritis. Seperti halnya bahasa, kebudayaan memiliki arsitektur yang sama dengan arsitektur bahasa. Keduanya sama-sama dibangun dengan cara oposisi dan korelasi

melalui hubungan yang logis. Dalam bahasa, kita selalu mengenal adanya antonim dalam setiap kata. Begitu juga dalam kebudayaan, terkandung pula dua kondisi yang bertolak belakang. Beberapa contoh keadaan dalam suatu kebudayaan yang saling berlawanan (oposisi) antara lain baik dan buruk; untung dan rugi; sopan dan lancang.

Peranan Ahli Linguistik dalam Strukturalisme Levi-Strauss

Pemikiran Levi-Strauss mengenai strukturalisme ternyata berasal dari beberapa ahli teori linguistik (Ahimsa-Putra, 2003: 247). Ahli filsafat linguistik yang terbilang memberikan pengaruh penting bagi berkembangnya strukturalisme Levi-Strauss salah satunya Nikolai Trobetzkoy. Ia merupakan ahli filsafat linguistik Rusia yang berusaha merumuskan metode dasar dalam analisis linguistik struktural. Adapun keempat metode dasar dalam studi linguistik struktural, pertama, kajian ini mengalami pergeseran objek penelitian yang berawal dari mempelajari fenomena kesadaran dalam linguistik ke kajian infrastruktur alam bawah sadar pikiran manusia. Kedua, analisis linguistik memperlakukan sebuah istilah atau konsep sebagai sesuatu yang dependen dengan konsep lain. Adanya keterkaitan antar konsep inilah yang perlu diperhatikan dan ditekankan oleh Troubetzkoy. Ketiga, dengan didapatnya rangkaian antar konsep, maka terbentuklah sebuah sistem.

Keempat, sistem tersebut nantinya mengantarkan peneliti dalam merumuskan hukum umum (*general law*). Hukum umum inilah yang kemudian dipakai Levi-Strauss guna meyakinkan bahwa ilmu sosial posisinya bisa diakui secara sah dalam ilmu pengetahuan seperti halnya ilmu alam.

Ahli filsafat linguistik lainnya yang turut serta mempengaruhi pemikiran Levi-Strauss mengenai strukturalisme adalah Roman Jakobson. Ia berargumen bahwa sulit mengevaluasi secara benar sistem dalam suatu bahasa apabila tidak memperhatikan elemen lain yang terkandung pada sistem tersebut. Untuk itu ia mengajukan teori fonem guna membedakan sifat atau fitur antara konsep yang satu dengan konsep lainnya. Sistem pembedaan fitur ini berdasarkan atas oposisi biner. Misalnya saja dalam suatu bahasa mempunyai kata yang pengucapannya bersifat *voiceless* (penekanan ringan) dan *voiced* (penekanan berat). Berkenaan dengan ciri 'suara' dalam bahasa Indonesia, /p/, /t/, /k/, /c/, semuanya adalah [-suara], sedang /b/, /d/, /g/ dan /j/ adalah [+suara] (Ahimsa-Putra, 2012: 57). Perbedaan tersebut akan terlihat dalam contoh berikut ini.

Dalam bahasa Indonesia, terdapat kata *parang* dan *barang*. Meskipun kedua kata itu terlihat mirip, namun arti dan pengucapannya sangat berbeda. Ciri pembedanya terletak pada huruf /p/ (*voice-*

less) dan huruf /b/ (voiced). Jakobson mengungkapkan pula sebuah fonem akan memperoleh maknanya jika diposisikan secara tepat kedalam sistem fonem itu sendiri. Itu artinya peneliti harus melihat konteks dimana fonem tersebut berada. Untuk mengetahui makna parang dan barang secara tepat, maka ahli linguistik struktural harus menempatkan kata itu ke dalam relasi dengan kata lain. Disamping itu, makna dari kata tersebut bisa diperoleh melalui pemahaman konteks dimana kata tersebut diposisikan. Misalnya saja terdapat kalimat "Joni mengeluarkan parang dari sabuknya" dan "Joni mengeluarkan barang dari tasnya". Kalimat pertama menunjukkan makna parang sebagai sebuah benda tajam yang digunakan untuk memotong sesuatu. Hal ini dapat diketahui melalui pemahaman terhadap relasi kata yang satu dengan kata lainnya. Begitu pula dalam kalimat kedua memiliki makna yang berbeda. Makna barang dalam kalimat tersebut lebih umum, bisa berupa buku, pensil, telpon genggam dan sebagainya. Intinya, kita harus melihat konteks dan relasi kata untuk membedakan makna diantara kedua kata yang berlawanan fonemnya. Analisis fonem yang menghasilkan oposisi biner inilah selanjutnya digunakan oleh Levi-Strauss untuk mencarinya pula di dalam kebudayaan suatu masyarakat.

Selain kedua ahli linguistik di atas, perkembangan strukturalisme Levi-Strauss juga terpengaruh pemikiran Ferdinand de

Saussure. Ahli linguistik dari Swiss itu berpandangan bahwa bahasa adalah sebuah sistem keterkaitan antar konsep dimana nilai dari setiap konsep merupakan hasil dari penggabungan antara konsep satu dengan lainnya secara bersamaan. Dengan demikian, nilai dari konsep dalam sebuah bahasa tergantung konsep lain yang menyertainya.

Pemikiran kedua Saussure yaitu dalam suatu bahasa memiliki dua aspek, yakni *langue* dan *parole*. *Langue* adalah struktur yang mengatur terbentuknya suatu bahasa. *Langue* ini sifatnya tidak empiris, misalnya saja aturan Subjek-Predikat-Objek-Keterangan (SPOK), maupun aturan bahasa walikan pada komunitas tertentu di Malang, Jawa Timur. Sementara *parole* adalah manifestasi dari *langue* yang notabene bersifat empiris. Dalam bahasa terwujud suatu kalimat yang dilontarkan oleh penutur sebagai alat komunikasi.

Pandangan ketiga Saussure yang berkaitan dengan strukturalismenya Levi-Strauss adalah pentingnya melihat hubungan antara sintagmatik dan paradigmatis dalam suatu bahasa. Hubungan sintagmatik adalah rangkaian kata yang berurutan sehingga menghasilkan suatu makna. Sementara hubungan paradigmatis merupakan hubungan pengertian yang saling menggantikan antara satu kata dengan kata lain dalam sebuah kalimat. Misalnya, kata memakan bisa tergantikan dengan konsep menelan.

Gagasan lain Saussure yakni analisis dalam linguistik perlu memperhatikan “wadah” dan “isi”. Wadah dalam hal ini merupakan konsep pada suatu bahasa. Disisi lain, maksud dari “isi” adalah makna yang terkandung di dalam konsep. Supaya mengetahui isi, maka seorang peneliti perlu melihat konteks di luar konsep tersebut. Itu artinya, perhatian terhadap relasi antar konsep perlu dilakukan supaya mampu menemukan konteks maupun makna sebuah kalimat. Untuk itu dapat dikatakan bahwa relasilah yang menentukan isi.

Ide lain Saussure yaitu menyarankan supaya ahli linguistik memperhatikan kata. Ia berpendapat bahwa elemen dasar bahasa adalah tanda-tanda linguistik atau tanda-tanda kebahasaan (*linguistic sign*), yang wujudnya tidak lain adalah ‘kata-kata’ (Ahimsa-Putra, 2012: 34). Bagi Saussure bahasa pada dasarnya merupakan suatu sistem tanda. Kata dalam sebuah bahasa dapat pula dikatakan sebagai sebuah tanda (*sign*), karena sifatnya *arbitrer*. Sebagai sebuah tanda, kata menyimpan tinanda (*signified*) dan penanda (*signifier*). Tinanda ialah sesuatu yang berada dibalik penanda, biasanya berupa makna ataupun gagasan. Sementara penanda adalah wujud nyata dari tinanda, yaitu berupa kata-kata. Secara sederhana dapat digambarkan seperti ini, kata “kursi” mempunyai “tinanda” dan penanda. Tinandanya berupa gagasan atau ide mengenai

sebuah benda yang digunakan sebagai tempat duduk. Penandanya dapat berwujud sebuah kata atau konsep “kursi” itu sendiri dan sifatnya pun *arbitrer*, misalnya bisa berupa konsep *chair* (Inggris) atau *dingklik* (Jawa).

Asumsi Dasar Strukturalisme Levi-Strauss

Seperti halnya epistemologi pada umumnya, strukturalisme mengandung sejumlah elemen asumsi dasar yang menjadi landasan filosofisnya. Keseluruhan asumsi dasar strukturalisme Levi-Strauss adalah hasil penggabungan dari teori analisis linguistik yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya. Hal ini dikarenakan Levi-Strauss sangat tertarik mengadopsi analisis linguistik struktural sebagai dasar memahami kebudayaan. Dengan cara demikian, Levi-Strauss semakin yakin bahwa ilmu sosial, terutama antropologi, mampu diakui kebenarannya sebagai ilmu pengetahuan tanpa harus menggunakan alat analisis kaum positivisme. Berikut beberapa asumsi dasar dari strukturalisme yang menjadi fondasi kebenaran soal kebudayaan.

Basis Pengetahuan dalam Strukturalisme

Strukturalisme dalam melihat keobjektifan rupanya memiliki cara tersendiri. Menurut Levi-Strauss (2005), keobjektifan ilmu sosial mampu dicapai karena kebudayaan menyimpan struktur yang

tidak bisa dipengaruhi oleh si peneliti. Realitasnya tergambarkan pada fenomena seorang individu ketika berbicara. Tatkala individu berkomunikasi melalui bahasa, ia sebenarnya tidak menyadari aturan-aturan yang berlaku dalam pembentukan kalimat yang disampaikan. Aturan-aturan itu acapkali disebut sebagai tata bahasa yang dimiliki oleh segala jenis bahasa di muka bumi ini. Hal ini dikarenakan aturan-aturan tata bahasa bersifat *unconsciousness*. Berdasarkan kenyataan itu maka sulit rasanya jika seorang peneliti mampu mempengaruhi *grammar* yang notabene berada dalam alam bawah sadar. Seperti halnya bahasa, kebudayaan yang menjadi objek penelitian ilmu sosial sebenarnya berasal dari alam bawah sadar sehingga sulit dipengaruhi oleh pihak peneliti. Singkatnya, strukturalisme berupaya mencari struktur pikiran yang terletak pada alam bawah sadar manusia. Struktur pikiran itulah yang diyakini oleh epistemologi strukturalisme sebagai penggerak (*driver*) dari segala tingkah laku manusia.

Selain itu, Michael Lane memandang bahwa dalam strukturalisme, berbagai aktivitas sosial dan hasilnya, seperti, dongeng, upacara-upacara, sistem-sistem kekerabatan dan perkawinan, pola tempat tinggal, pakaian dan sebagainya, secara formal semuanya dapat dikatakan sebagai bahasa-bahasa (Ahimsa-Putra, 2012: 66). Pernyataan ini didasarkan pada segala aktivitas itu memiliki pesan yang ingin

disampaikan antara individu atau kelompok yang satu dengan pihak lain. Dengan kata lain, kebudayaan dalam strukturalisme dipandang sebagai suatu bahasa atau alat komunikasi diantara individu yang satu dengan lainnya.

Manusia dalam Strukturalisme

Epistemologi ini mempunyai pandangan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk menstruktur (Ahimsa-Putra, 2012). Asumsi ini nampak nyata ketika seorang bayi yang belum bisa belajar berbicara diajari oleh orang tuanya mengenai bahasa sehari-hari. Bayi tersebut tidak serta-merta diberikan struktur tata bahasa yang baik secara mentah seperti halnya seorang siswa asing belajar bahasa Indonesia. Namun sang ibu memberikan struktur bahasa melalui percakapan sehari-hari. Untuk selebihnya si bayi secara nirsadar menstruktur pengetahuan bahasa yang diperoleh dari orang tuanya.

Selain itu, strukturalisme memandang manusia memiliki struktur dalam (*deep structure*) yang bernaung pada alam bawah sadar pikirannya. Struktur dalam inilah yang selanjutnya mengatur segala tingkah laku manusia secara nirsadar. Asumsi ini terkait dengan tujuan strukturalisme yang mencoba menghindari hal-hal yang sifatnya berada pada tataran struktur permukaan (*surface structure*). Struktur permukaan yang dimaksud seperti halnya fenomena relasi sosial

diantara individu yang satu dengan lainnya.

Atas upayanya mencari struktur dalam, strukturalisme kemudian menemukan asumsi dasar lainnya yang mengatakan bahwa segala jenis manusia pada dasarnya memiliki nalar yang sama dalam setiap aktivitasnya di dunia ini. Lebih jauh lagi, melalui asumsi ini, strukturalisme mampu menyimpulkan bahwa nalar masyarakat tradisional (*tribal society*) mempunyai kesamaan pada masyarakat modern (*modern society*). Pernyataan ini dibuktikan Levi-Strauss melalui gejala sosial budaya berupa ritual. Ritual (*rites*) seperti halnya suatu permainan atau pertandingan (*games*) (Levi-Strauss, 1966). Keduanya memiliki segala jenis aturan yang menggerakkan proses berlangsungnya aktivitas tersebut. Selain itu, baik ritual maupun permainan terdiri atas berbagai aktor yang berperan dalam acara tersebut. Bedanya, permainan lebih cenderung memiliki efek 'memisahkan' antara pihak yang menang dan kalah. Sementara ritual menyimpan efek sebaliknya, yakni justru bersifat menyatukan.

Berlandaskan konsep ritual itu, maka strukturalisme menemukan kesamaan nalar pada masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Masyarakat tradisional acapkali menjalankan proses ritual dalam kehidupannya, misalnya saja ritual persembahan babi kepada leluhur mereka. Begitu pula dengan masyarakat modern, mereka juga melakukan proses

ritual seperti halnya proses pertandingan sepakbola, acara wisuda pada suatu universitas dan lain sebagainya. Dengan demikian, strukturalisme memandang bahwa masyarakat tradisional dan masyarakat modern memiliki kesamaan nalar berpikir yang membentuk segala aktivitasnya.

Kebudayaan dalam Strukturalisme

Elemen asumsi dasar berupa kebudayaan dalam strukturalisme lebih menonjol jika dibandingkan elemen lainnya. Adapun beberapa asumsi dasar epistemologi strukturalisme yang berkaitan dengan kebudayaan. Pertama, kebudayaan itu mengandung *Lingue* dan *Parole* (Ahimsa-Putra, 2003). Asumsi dasar ini berpandangan bahwa kebudayaan itu seperti halnya bahasa yang memiliki *lingue* dan *parole*. Jika pada bahasa, *lingue* merupakan sistem aturan yang mengatur tata bahasa. Sementara *parole* merupakan wujud dari tata bahasa (*grammar*) yang nantinya berupa ucapan, kalimat maupun tuturan berdasarkan *lingue* dalam masing-masing bahasa. *Lingue* dalam konteks kebudayaan dapat dipahami sebagai suatu sistem aturan yang mengatur perilaku dan cara berpikir manusia ketika menjalani kehidupannya. *Parole* adalah manifestasi dari aturan-aturan yakni berupa perilaku, tindakan dan segala bentuk kebudayaan yang diciptakan oleh manusia. *Parole* ini sifatnya empiris, sedangkan *lingue* bersifat abstrak.

Kebenaran asumsi ini terlihat pada kasus yang terpaparkan berikut ini. Dalam sebuah keluarga Jawa yang menetap di Yogyakarta terdapat seorang anak berusia delapan tahun. Ketika bertemu dengan orang lain ia selalu mengajak berjabat tangan. Ia acapkali bersalaman dengan menggunakan tangan kanan. Begitu juga ketika ia sedang makan, ia memakai tangan kanannya untuk mengambil dan memegang makananan. Perilaku tersebut muncul karena dalam diri si anak telah tertanam norma yang mengajarkan bahwa ketika berjabat tangan maupun memegang makanan seharusnya menggunakan tangan kanan. Selain itu, si anak menganut nilai yang mengajarkan jika mengambil makanan dan berjabat tangan tidak boleh menggunakan tangan kiri karena jelek dan tidak sopan. Norma dan nilai itu berlandaskan pandangan bagi masyarakat Jawa bahwa tangan kiri seringkali digunakan untuk *cebok*, membersihkan sisa buang air besar manusia. Oleh karena itu, tangan kiri dinilai tidak sopan apabila dipakai untuk melakukan jabat tangan ataupun memegang makanan.

Dari kasus di atas, kita mampu menganalisa bentuk *langue* dan *parole* yang ada di dalam kebudayaan masyarakat Jawa. *Langue* pada kasus itu tercermin dari norma dan nilai yang dianut oleh si anak. Aturan tidak tertulis berupa larangan berjabat tangan dan memegang makanan dengan tangan kiri adalah *langue* yang

mengontrol si anak supaya berperilaku demikian. *Parole* nampak pada tindakan si anak yang selalu menggunakan tangan kanan ketika berjabat tangan dengan orang lain serta ketika ia sedang memegang makanan. Dengan kata lain, *parole* merupakan wujud perilaku yang dapat dibuktikan secara empiris.

Kedua, kebudayaan itu mengandung tinanda dan penanda. Seperti halnya bahasa, kebudayaan juga mempunyai tinanda dan penanda. Asumsi ini dipengaruhi oleh pemikirannya Ferdinand de Saussure dalam menganalisa bahasa. Lantaran Levi-Strauss menyadari adanya kemiripan antara gejala bahasa dan kebudayaan, maka ia menggunakan konsep tinanda dan penanda untuk menganalisa fenomena kebudayaan. Di samping itu, akan selalu ada hubungan fungsional diantara penanda dan tinanda (Levi-Strauss, 1967: 159).

Dalam sebuah bahasa, kata dapat pula dikatakan sebagai sebuah tanda, karena sifatnya *arbitrer*. Sebagai tanda, kata menyimpan tinanda (*signified*) dan penanda (*signifier*). Tinanda ialah sesuatu yang berada dibalik penanda, biasanya berupa makna ataupun gagasan. Sementara penanda adalah wujud nyata dari tinanda, yaitu berupa kata-kata. Jika kedua hal itu diterapkan pada analisa kebudayaan, maka tinanda adalah makna atau ide yang terkandung di dalam suatu bentuk kebudayaan. Penanda merupakan ekspresi

dari tinanda yang merupakan wujud dari kebudayaan.

Untuk lebih jelasnya, asumsi dasar ini tercermin kedalam sebuah bentuk kebudayaan masyarakat Islam di Jawa. Masyarakat Jawa yang beragama islam, terutama laki-laki, seringkali mengenakan peci, sarung dan baju koko ketika menjalankan ritual agama. Ketiga benda itu merupakan bagian dari bentuk kebudayaan. Melalui asumsi ini, peci, sarung dan baju koko dapat dikatakan pula sebagai tanda. Tentu ketiganya mengandung tinanda dan penanda. Tinandanya ialah ketiga benda itu menunjukkan ide dan gagasan bahwa mereka bagian dari masyarakat Muslim. Hal ini didasarkan pada realitas bahwa ketiga benda itu merupakan alat ibadah kaum Muslim. Penandanya terletak pada wujud material kebudayaan masyarakat Jawa yang beragama islam, antara lain berupa peci, sarung dan baju koko.

Ketiga, kebudayaan itu bersifat sintagmatik dan paradigmatic. Asumsi dasar ini erat kaitannya dengan pemikiran Saussure soal analisis linguistik struktural. Dalam sebuah bahasa khususnya lagi pada "kata-kata", pasti terdapat hubungan sintagmatik dan paradigmatic. Hubungan sintagmatik sebuah kata adalah hubungan yang dimilikinya dengan kata-kata yang dapat berada di depannya atau di belakangnya dalam sebuah kalimat, seperti yang terdapat diantara kata 'makan' dengan kata

'saya' dan 'pisang' (Ahimsa-Putra, 2012: 47). Rangkaian kata tersebut tidak bisa keluar secara bersamaan ketika diucapkan. Itu artinya, harus diucapkan secara bertahap. Selain itu, susunan kalimatnya tidak bisa saling ditukar dikarenakan maknanya akan berbeda dan cenderung tidak logis. Contohnya, kalimat itu akan diubah menjadi "*Pisang makan saya*" atau "*Saya pisang makan*".

Lebih lanjut lagi, Ahimsa-Putra menjelaskan pengertian relasi paradigmatic sebagai hubungan asosiatif atau hubungan pengertian antara suatu kata dalam tuturan dengan kata-kata yang lain di luarnya. Singkatnya, sebuah kata dalam kalimat pasti memiliki kata lain (sinonim) yang mengandung makna hampir sama. Kata tersebut bisa saling menggantikan dalam satu kalimat yang sama. Hubungan paradigmatic bisa terlihat jelas dalam kalimat ini "*Salfia memakai gaun yang menawan*". Kata 'gaun' pada kalimat tersebut bisa tergantikan oleh kata 'kebaya'. Keduanya memiliki makna yang hampir sama. Relasi yang bisa menggantikan inilah disebut sebagai hubungan paradigmatic.

Lantas bagaimana jika hubungan sintagmatik dan paradigmatic ini diterapkan pada analisis kebudayaan? Analisis menggunakan kedua konsep tersebut mampu diterapkan pada kasus prosesi upacara kematian di kalangan masyarakat Muslim Jawa. Dalam tradisi mereka, ter-

dapat beberapa tahapan upacara kematian. Tahapan pertama yaitu memandikan jenazah serta mengeluarkan segala kotoran yang ada di tubuhnya. Proses kedua ialah membalut jenazah dengan kain kafan berwarna putih. Langkah selanjutnya yakni menaruh jenazah di sudut rumah untuk disholatkan. Tindakan keempat adalah menyunggi jenazah keluar halaman untuk berpamitan dengan masyarakat yang hadir pada upacara tersebut. Lalu proses berikutnya adalah membawa jenazah dengan peti ke pemakaman. Tahapan terakhirnya yaitu menguburkan jenazah di pemakaman.

Rangkaian upacara kematian di atas tentunya dapat dijelaskan melalui konsep sintagmatik dan paradigmatic. Rangkaian tahapan upacara kematian dari pemandian hingga proses penguburan adalah hubungan sintagmatik. Pelaksananya pun tidak bisa berlangsung secara bersamaan dalam satu kejadian. Disamping itu, kedudukan beberapa tahapan upacara kematian tidak bisa saling dipertukarkan. Hal ini akan berpengaruh pada makna yang nantinya justru mengalami perubahan. Wujud hubungan paradigmaticnya yaitu kain kafan bisa digantikan oleh kain katun, kain mori, maupun kain layar asalkan berwarna putih. Proses digantinya kain tersebut tidak akan mengubah makna kain kafan itu sendiri asalkan tetap berwarna putih. Apabila warna kainnya yang diganti, maknanya akan berubah

dikarenakan warna putih mempunyai pandangan tentang kesucian dan bersih bagi jenazah yang menghadap panggilan Tuhannya.

Keempat, kebudayaan itu mengandung relasi yang menentukan isi. Jika dalam sebuah bahasa Saussure berpandangan bahwa terdapat “wadah” dan “isi”. Wadah pada konteks ini bisa diartikan secara sederhana sebagai konsep. Sementara “isi” adalah sesuatu yang terkandung di dalam wadah (konsep) tersebut. Isi juga boleh diartikan sebagai makna dari konsep. Lebih lanjut lagi, isi sanggup diketahui apabila dikaitkan dengan relasi konsep (wadah) lainnya. Hal ini dikarenakan bahasa juga merupakan sebuah sistem dari istilah-istilah yang saling tergantung (*interdependent terms*), dimana nilai dari setiap istilah atau kata adalah hasil dari kehadiran, keberadaan, istilah-istilah yang lain sekaligus (Ahimsa-Putra, 2012). Dengan demikian, untuk melihat isi, kita perlu mengetahui konteks dimana wadah tersebut ditempatkan.

Pemikiran Saussure akan mampu dimengerti secara baik jika kita melihat perbedaan dan persamaan pada contoh berikut ini. Terdapat sebuah kalimat yang mengatakan, “*Atut, seorang gubernur Banten pada akhirnya dijerumuskan ke meja hijau setelah melakukan praktek korupsi*”. Kalimat lainnya yaitu, “*Seorang anak menangis karena ingin dibelikan meja hijau di toko yang menjual peralatan dan*

perlengkapan sekolah". Kedua kalimat itu sama-sama memakai konsep "meja hijau". Akan tetapi, keduanya mempunyai makna yang berbeda. Perbedaan makna ini hanya bisa dipahami jikalau kita melihat relasinya dengan kata-kata yang berada di sekitarnya. Arti meja hijau pada kalimat pertama memiliki makna pengadilan. Hal ini berkorelasi dengan konsep korupsi yang posisinya berada dalam satu kalimat. Sementara kalimat kedua, konsep meja hijau menyimpan makna meja belajar berwarna hijau. Makna tersebut terbentuk karena adanya hubungan dengan konsep "peralatan dan perlengkapan sekolah".

Supaya mampu dipahami lebih dalam lagi, kita akan melihatnya pada kasus kehidupan sehari-hari. Pada komunitas atlet olahraga voli, mereka menggunakan sebuah bola voli yang telah terstandarisasi tingkat ukuran, daya pantul serta bentuknya. Oleh karena itu, mustahil bagi mereka menggunakan bola basket maupun bola yang digunakan untuk permainan sepak bola dalam rangka memainkan olah raga voli. Disisi lain, beberapa anak di dalam sebuah kampung bermain sepak bola dengan menggunakan bola voli. Mereka bermain dengan cara menendang bola voli tersebut ke gawang masing-masing lawan mainnya. Dari contoh kasus di atas, kita sekilas memahami bahwa keduanya menggunakan bola yang sama, yakni bola voli. Bola voli itulah yang disebut sebagai wadah. Walaupun demikian, bola voli itu

sebenarnya isinya berbeda meskipun wadahnya sama. Kita dapat mengetahui "isi" dari bola tersebut jika memperhatikan konteks dimana bola itu ditempatkan atau dimainkan. Bola pada contoh pertama digunakan sesuai dengan wujudnya, yakni untuk permainan bola voli. Pada contoh kedua, bola dipakai untuk permainan sepakbola. Meskipun wadah keduanya sama, namun isinya berbeda. Keduanya memiliki wadah yang sama, yaitu bola voli. Akan tetapi, kasus pertama "isinya" merupakan bola yang digunakan untuk permainan olahraga voli. Kasus kedua, "isi" dari bola voli sebagai alat yang dipakai dalam rangka permainan sepakbola. Untuk itu, perlu memperhatikan relasi "wadah" dengan lingkungan disekitarnya supaya memahami "isi".

Contoh peristiwa lainnya yang mampu menggambarkan asumsi dasar ini adalah penggunaan asbak dikalangan mahasiswa. Sekumpulan mahasiswa sedang berdiskusi di kampus. Beberapa diantaranya merokok, namun tidak membawa asbak sebagai penampung abu. Salah satu diantaranya kemudian mengambil sebuah gelas plastik bekas air mineral. Mereka pun menggunakannya sebagai penampung abu beserta putung rokok yang tersisa. Seketika itu, gelas plastik tersebut menjadi asbak, bukan lagi sebagai wadah air mineral. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa nilai yang diberikan pada gelas plastik samahalnya dengan nilai yang ada

pada sebuah asbak. Asbak rokok telah mengalami transformasi bentuk berupa gelas air mineral. Walaupun demikian, asbak memang telah mengalami perubahan “wadah”, sementara “isinya” masih tetap sama yakni sebagai tempat penampung abu rokok. Singkatnya, wadah tetap, namun isinya sudah jelas berbeda. Perubahan tersebut terjadi karena adanya relasi yang menentukan isi. Oleh karena itu, sangat penting memahami relasi wadah dengan lingkungan di sekitarnya guna memahami isi yang tersimpan di dalam wadah tersebut.

Kelima, kebudayaan bersifat transformatif. Asumsi dasar ini mengacu pula pada pemikiran Saussure yang mengungkapkan bahwa sebuah konsep ditentukan maknanya oleh relasi-relasi tertentu secara sinkronis. Saussure menyarankan supaya dalam menelaah suatu sistem maupun fenomena, perlu memposisikan terlebih dahulu hubungan-hubungannya dengan fenomena lain pada titik waktu tertentu. Itu artinya, relasi konsep yang satu dengan konsep lainnya pada titik waktu tertentu inilah yang menentukan makna dari konsep tersebut. Hal ini dikarenakan adanya hukum transformasi dalam bahasa. Hukum transformasi adalah keterulangan-keterulangan (*regularities*) yang tampak, melalui mana suatu konfigurasi struktural berganti menjadi konfigurasi struktural yang lain (Ahimsa-Putra, 2012: 69). Dalam konteks ini, persoalan diakronis bukanlah

sesuatu yang penting untuk memahami transformasi. Maka dari itu, perubahan dalam pandangan strukturalisme bukanlah persoalan sebab akibat, namun lebih kepada bentuk perubahan pada struktur yang lain.

Pemahaman asumsi ini bisa lebih tergambar dalam fenomena perubahan jilbab di kalangan wanita Muslim Indonesia. Dari masa ke masa, jilbab acapkali mengalami transformasi bentuk. Bentuk jilbab mengalami perubahan variasi. Konfigurasi bentuk jilbab ini dapat dipahami sebagai transformasi dari konfigurasi jilbab yang lain. Hingga akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa bentuk jilbab akan selalu bertransformasi dengan cara tertentu.

Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Strukturalisme

Asumsi dasar ilmu sosial atau budaya dalam strukturalisme erat kaitannya dengan tujuan dari ilmu pengetahuan tersebut. Dalam hal ini, strukturalisme memandang bahwa tujuan dari ilmu sosial adalah mencari persamaan-persamaan dalam berbagai fenomena sosial budaya yang nantinya diperoleh suatu generalisasi. Penekannya terletak pada langkah generalisasi terlebih dahulu yang kemudian berlanjut pada tahapan membandingkan. Dengan adanya generalisasi ini, maka peneliti ilmu sosial dan budaya dapat membandingkan gejala sosial yang satu dengan yang lainnya.

Hal ini sangat nampak pada tulisannya Levi-Strauss yang berjudul Totemism. Ia melihat bahwa terdapat persamaan kepercayaan diantara sukubangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain. Persamaannya yakni hampir setiap suku bangsa dulunya memiliki kepercayaan totemisme. Totemisme dalam hal ini diartikan sebagai *"... a form of social organization and magico-religious practices, of which the central feature is the association of certain groups (usually clans or lineages) within a tribe with certain classes of animate or inanimate things, the several groups being associated with distinct classes."* (Levi-Strauss, 1963: 10). Merujuk pada definisi totemisme, Strauss mengungkapkan bahwa setiap kepercayaan sekelompok masyarakat selalu mengasosiasikan dirinya dengan makhluk lain di luar diri manusia. Inilah wujud dari generalisasi. Hal ini kemudian dapat dipakai untuk membandingkan asosiasi kelompok yang satu dengan yang lain terkait dengan perbedaan dan persamaan wujud totemnya. Ada sekelompok masyarakat yang mengasosiasikan dirinya dengan serigala, dan ada pula yang melekatkan dirinya kepada burung elang.

Model Strukturalisme

Berdasarkan konsep model yang telah dipaparkan pada bagian awal, maka kita akan melihat secara jelas terkait model strukturalisme. Jika kita pahami secara mendalam asumsi dasar dari struktural-

isme, model yang digunakan Levi-Strauss dalam membangun epistemologi ini tercermin secara implisit. Asumsi dasar yang dipakai oleh Levi-Strauss selalu memiliki hubungan dengan fenomena bahasa. Hal ini dikarenakan Levi-Strauss memang sejak awal mengadopsi analisis bahasa atau linguistik untuk diterapkan dalam memahami gejala sosial budaya.

Berpijak pada kenyataan itu, model yang dipakai Levi-Strauss dalam rangka membangun strukturalisme adalah bahasa. Itu artinya, kebudayaan dalam pandangan strukturalisme seperti halnya bahasa. Gejala kebudayaan memiliki karakteristik yang sama dengan fenomena bahasa. Karakteristik yang dimaksud yaitu keduanya merupakan produk dari alam bawah sadar pikiran manusia dan mempunyai struktur yang menggerakkan segala tingkah laku manusia.

Nilai dalam Strukturalisme

Sebagai sebuah epistemologi, strukturalisme menyimpan beberapa nilai yang menjadi landasan dalam memandang suatu gejala sosial-budaya. Pengertian tentang nilai dapat dijelaskan sebagai sejumlah kriteria atau patokan yang digunakan untuk menentukan apakah sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah, bermanfaat atau tidak (Ahimsa-Putra, 2016: 26). Dalam konteks ilmu pengetahuan, nilai dipakai sebagai tolok ukur bagaimana sesuatu dipandang baik atau buruk, benar

atau salah, ilmiah atau khayal dan sebagainya. Hal inilah yang kemudian mengantarkan bagaimana ilmu pengetahuan mencari kebenaran dalam mengkaji suatu realitas.

Tersimpan beberapa nilai yang ada pada strukturalisme. Pertama, keobjektifan dalam ilmu sosial dapat dipahami melalui alam bawah sadar pikiran manusia yang sulit dipengaruhi oleh peneliti. Itu artinya, tolok ukur kebenaran, salah satunya objektivitas, mengenai realitas sosial budaya dalam pandangan kaum strukturalisme Levi-Strauss mampu diperoleh melalui cara tersebut. Maka dari itu, secara sederhana dapat dikatakan strukturalisme berpandangan bahwa ilmu sosial tergolong baik hasilnya apabila memahami kebudayaan melalui alam bawah sadar pikiran manusia. Kedua, ilmu sosial terbilang baik apabila mampu mengungkap struktur kebudayaan yang berada di alam bawah sadar pikiran manusia. Ketiga, ilmu sosial sebaiknya mencari hukum-hukum transformasi, bukannya hukum-hukum sebab akibat. Keempat, ilmu sosial yang baik adalah mencari generalisasi terlebih dahulu untuk dapat membandingkan gejala sosial pada satu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Keunggulan dan Kelemahan

Ibarat dua sisi mata uang, sebuah epistemologi mustahil terlepas dari sisi keunggulan ataupun kelemahan. Sejatinya,

epistemologi memiliki batasan-batasan semacam asumsi dasar, model dan nilai dalam rangka memahami fenomena sosial budaya. Dengan keberadaan batasan tersebut, strukturalisme dapat dipastikan mengandung kelemahan serta keunggulan. Pertama akan dipaparkan terlebih dahulu mengenai keunggulan dari strukturalisme yang dikembangkan oleh Levi-Strauss ini. Beberapa keunggulan strukturalisme antara lain (1) mampu memahami fakta sosial-budaya yang bersifat tidak empiris. Keunggulan ini sebagai konsekuensi atas perhatian strukturalisme supaya mengkaji gejala sosial-budaya yang berada pada tataran alam bawah sadar pikiran manusia. Selain itu, strukturalisme (2) dapat mengokohkan posisi ilmu sosial, terutama antropologi sebagai ilmu pengetahuan yang sah melalui pembantahan atas keraguan objektivitas. Keobjektifan ilmu sosial mampu diperoleh karena strukturalisme mengkaji fenomena yang sulit dipengaruhi oleh peneliti, yakni kebudayaan yang terletak pada nir sadar pikiran manusia. Keunggulan selanjutnya adalah (3) strukturalisme sangat cocok untuk melakukan studi literatur atas fenomena kekerabatan, mitos maupun kajian terhadap novel ataupun karya sastra lainnya. Itu artinya, epistemologi ini memungkinkan bagi penelitiannya untuk tidak harus melakukan penelitian lapangan (*field research*).

Bersamaan dengan hadirnya keunggulan, strukturalisme rupanya menyimpan

kelemahan di dalam menganalisa persoalan sosial budaya suatu masyarakat. Salah satu kelemahannya yaitu (1) strukturalisme sulit dipakai guna memahami fenomena sosial berupa relasi kuasa dan hubungan sosial produksi. Hal ini terkait dengan kelemahan strukturalisme yang selanjutnya yakni (2) cenderung memandang masyarakat sebagai sebuah sistem kebudayaan yang tertutup. Dengan kata lain, strukturalisme menafikkan eksistensi kekuatan dari luar kebudayaan masyarakat tersebut yang mampu mempengaruhinya. Oleh karena itu, strukturalisme tergolong sukar dipakai dalam menjelaskan fakta sosial soal ketimpangan sosial maupun ekonomi pada suatu masyarakat. (3) Lantaran terlalu fokus pada upaya pencarian struktur dalam (*deep structure*), strukturalisme pun tidak mampu menganalisis berbagai bentuk jaringan sosial yang saling terhubung antara individu yang satu dengan lainnya.

Persamaan dan Perbedaan

Positivisme dan strukturalisme sebagai bagian epistemologi dalam ilmu sosial sudah pasti menyimpan perbedaan di antara keduanya. Walaupun demikian, kedua epistemologi tersebut rupanya mengandung beberapa persamaan terkait dengan asumsi dasar, model dan nilai. Perbedaan yang terdapat di dalam kedua epistemologi itu antara lain, pertama, berada pada konsep hukum-hukum umum (*general law*). Jika dalam positivis-

me, *general law* berasal dari pencarian hubungan sebab akibat. Sementara *general law* pada strukturalisme bermula dari analisis hubungan sintagmatik dan paradigmatik. Sebelum *general law* diperoleh, ahli strukturalisme harus mampu mendapatkan struktur dan makna dalam suatu kebudayaan terlebih dahulu. Melalui analisis hubungan sintagmatik dan paradigmatiklah hal tersebut mampu didapatkan.

Perbedaan kedua berada pada konsep objektivitas yang diyakininya. Objektivitas dalam positivisme berada di tataran empiris, sedangkan strukturalisme objektivitasnya pada tataran alam bawah sadar pikiran manusia.

Ketiga, generalisasi dalam structuralisme adalah generalisasi konsep untuk mencapai perbandingan, bukan generalisasi proposisi atau hipotesis seperti dalam studi silang budaya (Ahimsa-Putra, 1994: 42). Misalnya melalui penciptaan generalisasi adanya *incest taboo* dalam setiap kebudayaan suatu masyarakat. Hal ini selanjutnya dipakai untuk membandingkan ragam *incest taboo* di berbagai masyarakat. Disisi lain, positivisme lebih menekankan perbandingan untuk mencapai generalisasi hipotesis.

Keempat, baik positivisme maupun strukturalisme mempunyai model yang berbeda dalam memandang suatu kebudayaan. Model positivisme ketika memahami kebudayaan seperti halnya suatu

organisme. Sementara model dari strukturalisme dalam menganalisis kebudayaan yaitu bahasa.

Terkait dengan persamaan kedua epistemologi itu, tersimpan beberapa poin. Pertama, keduanya mencari suatu *general law* dalam proses pengkajian atas gejala sosial budaya. Upaya pencarian *general law* itu supaya kedua epistemologi dapat diterima keberadaannya dalam tataran suatu ilmu pengetahuan. Kedua, baik positivisme maupun strukturalisme meyakini adanya objektivitas di dalamnya. Ketiga, keduanya sama-sama berpandangan bahwa suatu kebudayaan selalu memiliki unsur-unsur yang dinamis. Keempat, keduanya meyakini bahwa suatu masyarakat memiliki struktur yang terdiri atas berbagai unsur. Struktur pada konteks ini dimaknai sebagai sistem relasi diantara unsur yang satu dengan yang lainnya.[]

Daftar Pustaka

- Ahimsa-Putra, H.S. (1994). "Model-model Linguistik dan Sastra dalam Antropologi". *Bulletin Antropologi*, IX, 37–49.
- Ahimsa-Putra, H.S. (1997). "Antropologi Koentjaraningrat: Sebuah Tafsir Epistemologis". in E.K. Masinambow (Ed.), *Koentjaraningrat dan Antropologi di Indonesia* (pp. 25–48). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ahimsa-Putra, H.S. (2003). "Structural Anthropology in America and France: a Comparison". *Humaniora*, XV(3), 239–264.
- Ahimsa-Putra, H.S. (2011). "Paradigma, Epistemologi, dan Etnografi dalam Antropologi" (Makalah ceramah yang disampaikan di Departemen Antropologi, Unair). *Perkembangan Teori dan Metode Antropologi*. Surabaya.
- Ahimsa-Putra, H.S. (2012). *Strukturalisme Levi-Strauss: Mitos dan Karya Sastra*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Ahimsa-Putra, H.S. (2016). *Paradigma Profetik Islam: Epistemologi, Etos dan Model* (1st ed.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Bryant, C.G.A. (1985). *Positivism in Social Theory and Research: Theoretical Traditions in The Social Sciences* (1st ed.). London: Macmillan Publishers Ltd.
- Geertz, C. (1960). *The Religion of Java*. Illinois: The Free Press of Glencoe.
- Hardiman, F.B. (2003). *Melampaui Positivism dan Modernitas: Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas* (1st ed.). Yogyakarta: Kanisius.
- Heidtmann, J., Wysienska, K., & Szmataka, J. (2000). "Positivism and Types of Theories" in Sociology. *Sociological Focus*, 33(1), 1–26.
- Inkeles, A. (1965). *What is Sociology?* (4th ed.). Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.
- Koentjaraningrat. (2013). *Pengantar Ilmu Antropologi* (IX). Jakarta: Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. (2015). *Sejarah Teori Antropologi II*. Jakarta: UI Press.
- Levi-Strauss, C. (1963). *Totemism*. Boston: Beacon Press.

Levi-Strauss, C. (1966). *The Savage Mind*. London: The Garden City Press.

Levi-Strauss, C. (1967). *The Elementary Structures of Kinship* (Revised). Boston: Beacon Press.

Levi-Strauss, C. (2005). *Antropologi Struktural* (1st ed.). Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Saifuddin, A.F. (2005). *Antropologi Kontemporer : Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma* (2nd ed.). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Soemardjan, S. (1991). *Perubahan sosial di Yogyakarta* (3rd ed.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Author Guidelines

A. Persyaratan Umum

1. Naskah merupakan hasil penelitian sosial keagamaan dan modernitas yang sudah diformat sesuai pola penulisan artikel jurnal ilmiah.
2. Naskah diutamakan ditulis dalam Bahasa Inggris.
3. Naskah merupakan karya orisinal (bukan plagiasi) dan belum pernah dimuat di jurnal atau media cetak/online lainnya.
4. Naskah dikirim ke Redaksi JSW: Jurnal Sosiologi Walisongo melalui *submission* Open Journal Systems (OJS) pada <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/jsw>
5. Naskah diketik menggunakan Microsoft Word format RTF, font Times New Roman, size 12 pt, 1,5 spasi, ukuran halaman A4, dengan panjang tulisan 20-25 halaman (sekira 5.000 – 7.000 kata).
6. Keterangan lebih lanjut, silakan hubungi redaksi via email: jsw.fisip@gmail.com atau hubungi Kantor Redaksi (024) 7606405.

B. Persyaratan Khusus

1. Naskah merupakan hasil penelitian dalam bidang sosial keagamaan dan modernitas.
2. Naskah tidak mencantumkan nama penulis, instansi, dan alamat email. Nama penulis, instansi, dan alamat email dicantumkan saat melakukan registrasi OJS dan pengisian metadata naskah.
3. Naskah memuat:
 - a. Judul, dengan ketentuan:
 - Judul merupakan rumusan pokok bahasan yang singkat, padat, dan jelas.
 - Dalam judul sudah tercantum variabel-variabel utama penelitian.
 - Judul diketik dengan huruf kapital tebal (*capital, bold*).
 - b. Abstrak, dengan ketentuan:
 - Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.
 - Abstrak merupakan intisari dari pokok bahasan naskah.

- Abstrak ditulis dalam satu paragraf berjarak satu spasi, dengan panjang 100-250 kata.
 - Abstrak disajikan secara singkat dan jelas, dengan memuat empat unsur argumentasi logis, perlunya dilakukan penelitian untuk memecahkan masalah, pendekatan yang digunakan (metode), hasil yang dicapai, serta simpulan yang diperoleh (IMRAD: *introduction, methods, results, analysis and discussions*).
- c. Kata Kunci (*keywords*) maksimal 5 (lima) kata.
- d. Isi naskah, dengan sistematika sebagai berikut:
- Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta metodologi yang digunakan (IMRAD: *introduction, methods, results, analysis and discussions*).
 - Review pustaka yang berisi kajian teoretik dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.
 - Hasil dan pembahasan.
 - Simpulan dan rekomendasi.
 - Daftar pustaka.
4. Rujukan menggunakan APSA (*American Political Science Association*).[]

ACKNOWLEDGEMENTS

The members of editorial team of *JSW: Jurnal Sosiologi Walisongo* extend the gratitude to all the reviewers who have contributed to the peer review process of the manuscripts.

1. Abu Rokhmad, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Muhyar Fanani, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
3. Thohir Yuli Kusmanto, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

JSW**JURNAL
SOSIOLOGI
WALISONGO**

JSW: Jurnal Sosiologi Walisongo - ISSN 2503-3166 (print) ISSN 2503-3182 (online) is a critical, reflective, and transformative academic media that is published by Laboratorium Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, in the effort for developing the discipline of Sociology having the perspective of unity of sciences. Article is based on research in all division of sociology like sociology of religion, sociology of politic, sociology of law, sociology of development, urban/rural sociology, democracy, social ethic, anthropology, community development, social philosophy, gender, and social welfare.

LABORATORIUM SOSIOLOGI
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang - Indonesia

ISSN 2503-3166 (print)



ISSN 2503-3182 (online)

